

PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

Karmila Khairunnisa Daulay^{1*)}, Edi Epron Sihombing², Nursiah Hasibuan³

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indoensia

^{2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : kamilakhairunnisadaulay@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the management of public on-street parking in an effort to increase Local Genuine Revenue (PAD) from the parking retribution sector in North Padang Lawas Regency and to identify the obstacles in its management. This research utilizes a qualitative approach with a descriptive research type. The informants in this study consist of the North Padang Lawas Regency Transportation Office, parking attendants, and the general public. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation.

The results of the study show that the management of on-street parking by the North Padang Lawas Regency Transportation Office is classified as transparent, as information regarding on-street parking can be accessed directly by the public via the website or by visiting the Transportation Office. Accountability in on-street parking management is handled with full responsibility. The responsibility of parking management by the Transportation Office is also commendable, as every parking attendant is provided with attributes to identify those under the office's supervision. Independence in parking management is evidenced by policy-making that remains free from personal interests to ensure no party is disadvantaged. Monitoring activities are conducted, and problematic parking attendants are sanctioned without any discriminatory treatment. Fairness in on-street parking management is maintained by the office by consistently considering the interests of field officers and the public based on the principles of equality and fairness.

Key Word: *Parking Management, Local Genuine Revenue (PAD)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara dan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, juru parkir dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan penuh tanggung jawab. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikam atribut sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir terlihat saat mengambil kebijakan

tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Kegiatan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan. Kewajaran pengelolaan parkir tepi pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Kata kunci: Pengelolaan Parkir, Pendapatan Asli Daerah

I. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola segala potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menekankan bahwa peranan pemerintah daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, muncul asas desentralisasi yang bertujuan mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan yang merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Daerah lebih dituntut untuk bisa menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas

dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi besar dalam membuka lokasi perparkiran mulai dari lokasi sepanjang jalan umum, pertokoan, rumah makan, warung kupa dan sebagainya. Hal ini juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi juru parkir, bahkan ditahun 2024 sudah terdapat ± 200 juru parkir. Hal ini telah membuat pemerintah untuk serius dalam mengelola perpajakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, hingga saat ini pengelolaan profesi juru parkir sudah tergolong baik karena pemerintah telah memberikan pengawasan yang serius mulai dari pemberian berbagai atribut hingga membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh para juru parkir. Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nyatanya belum tercapai. Berdasarkan penjelasan diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengelolaan Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

II. Tinjau Pustaka

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu

periode tertentu. Selanjutnya Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :

- a) Hak Daerah
- b) Kewajiban Daerah
- c) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Sumber keuangan yang menjadi hak pemerintah daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/ Kabupaten lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan, termasuk di dalamnya dana darurat.

2.2 Parkir

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan

jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 32 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kemudian Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 menyebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3 Tata Kelola Parkir

Tata kelola atau pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Terdapat beberapa prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu

1. Transparansi
Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang saham.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas menekankan pada kepentingan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

4. Independensi

Independensi yaitu melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir.

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

III. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, secara sederhana kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Kriyantono menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini,

peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti.

4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah

1. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala sosial untuk kemudian dilakukan pencacatan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar

2. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen resmi, literature pendukung, dan juga dokumen berupa foto foto.

4.2 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan

informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, juru parkir dan masyarakat.

4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi adalah data-data yang terdapat dilapangan

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Untuk membuat ringkasan awal dari hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung dilapangan.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data bisa berbentuk tulisan maupun kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, dan agar peneliti tidak kesusahan dalam menguasai informasi baik dengan semua atau tugas-tugas tertentu dari hasil peneliti.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang telah diungkapkan diawal sifatnya masih sementara dan bisa berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain. Tetapi apabila pada awal kesimpulan yang sudah dijelaskan dapat didukung dengan bukti yang valid dan konsisten. Maka kesimpulan yang telah

diungkapkan adalah kesimpulan yang andal dan kredibel.

V. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab dan Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya serta pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

VI. Daftar Pustaka

- Aditya Wisnu Priambodo, 2013. Judul penelitian Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2013. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmad Yani. 2008. Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwin, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Depdikbud. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Duta Pertiwi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiono, 2016. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Sutedi., A, 2012. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaffah Rahmah, 2016. Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kabupaten Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.